

## FUNGSI KOORDINASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAH DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

<sup>1)</sup>Gusni Ayu, <sup>2)</sup>Sahar, <sup>3)</sup>Irwan, <sup>4)</sup>Adam Latif

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

[gusniayu.ip43161091@gmail.com](mailto:gusniayu.ip43161091@gmail.com)

[saharkhan43111125@gmail.com](mailto:saharkhan43111125@gmail.com)

[irwanirwan.410883@gmail.com](mailto:irwanirwan.410883@gmail.com)

[adamlatifsaja2017@gmail.com](mailto:adamlatifsaja2017@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Bagaimana Fungsi Koordinasi terhadap Pelaksanaan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Fungsi Koordinasi terhadap Pelaksanaan Pemerintah di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng. Populasi dalam hal ini adalah 31 aparatur kantor kecamatan serta kepala lingkungan kecamatan watang sidenreng , sedangkan pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan study kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistiik deskriptif, uji kualitas data, dengan menggunakan table frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 61,41% dalam kategori kurang baik, sedangkan factor yang mempengaruhi koordinasi dengan hasil akumulasi sebesar 63,31% dalam kategori kurang berpengaruh. Fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan hasil 60% dalam kategori kurang baik.

Kata Kunci : Koordinasi dan pelaksanaan pemerintah.

### Abstract

*This study aimed to determine the effect of the coordination function on the implementation of government in Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency. The population in this study were 31 sub-district office apparatus and the head of the Watang Sidenreng sub-district environment, the sampling period used was saturated sampling (census) with the technique of determining the sample if all population members were used as a sample of 31 people, this study used a Quantitative Descriptive Method. Data collection techniques are used through observation, interviews, questionnaires, and library research. The data analysis techniques used are Descriptive Statistics, Data Quality Test, using the Frequency Table and Likert Scale. The results of this study showed that the influence of the Coordination Function Against Government Implementation in Watang Sidenreng District with a value of 61.41% is categorized as "not good". the factors that influenced the Coordination with the accumulated results of 63.31% or categorized as "Less Influential". So that the Coordination Function Against the Implementation of Government in Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency with 60% results with the percentage "not good".*

*Keywords: coordination and implementation of government*

## A. PENDAHULUAN

Tujuan pertama dibentuk sebuah pemerintahan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat agar bisa menjalani kehidupannya dengan kedaiaman. Peran utama pemerintah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah dibentuk tidak untuk melayani diri sendiri, namun untuk melayani masyarakat, menjadikan keadaan yang membolehkan setiap anggota masyarakat bisa mengembangkan sumber daya dan daya kreasi dalam mencapai kesuksesan bersama. Dalam pemerintahan tentunya banyak yang terkait dalam rana pemerintahan dalam hal ini pemerintahan bisa di artikan dalam pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif. Pengaturan legislatif, kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintah pusat dengan daerah, serta rakyat dengan pemerintah setiap peristiwa serta gejala pemerintah. (Inu Kencana, 2017).

Keberadaan pemerintahan di Indonesia yang didalam penyelenggaraanya memiliki susunan organisasi yang kompleks yang telah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya, masing-masing yang saling berkaitan yang biasanya menimbulkan terjadinya benturan namun itu semua merupakan upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Menjalankan suatu kedudukan, peran dan fungsi pemerintah khususnya kecamatan dalam kegiatan sehari-hari akan selalu berhubungan dengan instansi-instansi terkait dengan apa yang ada didalam wilayahnya. Dalam kondisi tersebut, dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan, apalagi dalam hal fungsi koordinasi camat terhadap instansi-instansi baik itu vertikal maupun otonom yang ada didalam kecamatan.

Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyatuan tujuan dalam organisasi serta segala kegiatan pada suatu tingkat yang terpisah dalam lingkup suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dahulu. koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak bisa terpisah dari fungsi manajemen lainnya karena fungsi koordinasi adalah fungsi yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Banyak referensi yang mengatakan

bahwa fungsi koordinasi adalah fungsi manajemen yang paling inti atau paling utama, manajemen yang paling utama dalam menjalankan fungsi koordinasi, organisasi menjadi baik serta terhindar dari resiko yang akan mengancam organisasi. (Zainuddin, 2017)

Lingkup dalam suatu organisasi setiap pemimpin harus untuk mengkoordinasikan kegiatan pada anggota organisasi yang ditugaskan dalam penyelesaian tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang terbuka, komunikasi yang tepat, dan pembagian kerja pada para bawahan oleh pimpinan maka setiap bawahan akan mengajarkan pekerjaannya sesuai dengan tugas yang diterima. Tanpa adanya suatu koordinasi setiap pekerjaan dari individu (bawahan) tujuan dari organisasi atau instansi tidak akan berhasil.

Sehubungan dengan kedudukan camat sebagai administrator dalam pelaksanaan pemerintahan di kecamatan Watang Sidenreng maka peran dan fungsi camat sangat dibutuhkan dalam hal mengkoordinasikan setiap gerak langkah dan tindakan segenap perangkat pemerintahan, baik instansi-instansi vertikal maupun dinas-dinas daerah, serta kepala desa/Lurah yang ada didalam wilayah kerjanya demi kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan maupun pembinaan masyarakat. Mengenai pentingnya koordinasi tidak seorangpun dapat membantahnya dimana semua pekerjaan harus melibatkan beberapa orang, beberapa unit, ataupun beberapa instansi untuk menanganinya. penciptaan koordinasi melalui melalui alat-alat agar organisasi menjadi suatu sistem koordinasi yang disadari ini tentunya merupakan tanggung jawab pertama administrator.

Maka sesuai dengan observasi awal yang saya temukan bahwa fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Watang Sidenreng bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan dengan belum terjadinya koordinasi yang baik antara aparatur pemerintahan yang ada di Kecamatan Watang Sidenreng, serta dalam proses perencanaan pembangunan terkadang belum Tujuan pertama dibentuk sebuah pemerintahan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat agar bisa menjalani kehidupannya dengan kedaiaman.

Peran utama pemerintah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah dibentuk tidak untuk melayani diri sendiri, namun untuk melayani masyarakat, menjadikan keadaan yang membolehkan setiap anggota masyarakat bisa mengembangkan sumber daya dan daya kreasi dalam mencapai kesuksesan bersama. Dalam pemerintahan tentunya banyak yang terkait dalam rana pemerintahan dalam hal ini pemerintahan bisa di artikan dalam pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif. Pengaturan badan legislatif, kepemimpinan, dan juga koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, mau pun rakyat dengan pemerintahannya dalam setiap peristiwa dan gejala pemerintahan. (Inu Kencana, 2017).

Keberadaan pemerintahan di Indonesia yang didalam penyelenggaraannya memiliki susunan organisasi yang kompleks yang telah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya, masing-masing yang saling berkaitan yang biasanya menimbulkan terjadinya benturan namun itu semua merupakan upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjalankan suatu kedudukan, peran dan fungsi pemerintah khususnya kecamatan dalam kegiatan sehari-hari akan selalu berhubungan dengan instansi-instansi terkait dengan apa yang ada didalam wilayahnya. Dalam kondisi tersebut, dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan, apalagi dalam hal fungsi koordinasi camat terhadap instansi-instansi baik itu vertikal maupun otonom yang ada didalam kecamatan.

Koordinasi di definisikan sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan organisasi dan kegiatan pada tingkat satu-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang tidak bisa terpisah dari fungsi manajemen lainnya karena fungsi koordinasi adalah fungsi yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Banyak referensi yang mengatakan bahwa fungsi koordinasi merupakan fungsi manajemen yang paling utama dalam menjalankan fungsi koordinasi, organisasi akan menjadi semakin baik dan menghindari

resiko yang mengancam organisasi. (Zainuddin, 2017)

Dalam suatu organisasi setiap pemimpin harus untuk mengkoordinasikan kegiatan pada anggota organisasi yang ditugaskan dalam penyelesaian tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang terbuka, komunikasi yang tepat, dan pembagian kerja pada para bawahan oleh pimpinan maka setiap bawahan akan mengajarkan pekerjaannya sesuai dengan tugas yang diterima. Tanpa adanya suatu koordinasi setiap pekerjaan dari individu (bawahan) tujuan dari organisasi atau instansi tidak akan berhasil.

Sehubungan dengan kedudukan camat sebagai administrator dalam pelaksanaan pemerintahan di kecamatan Watang Sidenreng maka peran dan fungsi camat sangat dibutuhkan dalam hal mengkoordinasikan setiap gerak langkah dan tindakan segenap perangkat pemerintahan, baik instansi-instansi vertikal maupun dinas-dinas daerah, serta kepala desa/Lurah yang ada didalam wilayah kerjanya demi kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan maupun pembinaan masyarakat. Mengenai pentingnya koordinasi tidak seorangpun dapat membantahnya dimana semua pekerjaan harus melibatkan beberapa orang, beberapa unit, ataupun beberapa instansi untuk menanganinya. penciptaan koordinasi melalui melalui alat-alat agar organisasi menjadi suatu sistem koordinasi yang disadari ini tentunya merupakan tanggung jawab pertama administrator.

Maka sesuai dengan observasi awal yang saya temukan bahwa fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Watang Sidenreng bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan dengan belum terjadinya koordinasi yang baik antara aparatur pemerintahan yang ada di Kecamatan Watang Sidenreng, serta dalam proses perencanaan pembangunan terkadang belum melibatkan semua tokoh sehingga hal ini mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah agar tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh.

Melihat bahwa fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahannya contoh misalnya pelayanan yang belum terlaksana dengan baik, sengketa pembangunan jalan yang belum merata di

setiap desa dan kelurahan, pembangunan lapangan sepak bola yang belum difungsikan atau dimanfaatkan dengan baik dan juga jarang dilaksanakannya rapat koordinasi antar kepala desa/kelurahan dan aparat yang ada didalam kecamatan . Hal ini demikian terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah kelurahan/desa. Hal ini tentunya membutuhkan keterampilan dan kemampuan setiap pemimpin yang berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara koordinasi melalui kepemimpinannya agar dapat menjalankan suatu fungsi koordinasi antar instansi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan koordinasi melalui alat-alat agar organisasi menjadi suatu sistem koordinasi yang disadari ini tentunya merupakan fungsi utama administrator (camat). oleh sebab itu yang penting untuk bagaimana caranya agar menanamkan pengertian yang se jelasnya mengenai arti dan pentingnya suatu koordinasi karena seperti yang kita ketahui bahwa satu unit , seseorang ataupun suatu instansi mungkin tidak dapat bekerja sendiri dengan sempurna tanpa adanya suatu koordinasi yang terjadi didalamnya dan menciptakan mekanisme koordinasi dan menjaganya untuk selalu terlaksana dengan semestinya

Uraian tersebut diatas penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu Fungsi Koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, dengan alasan bahwa koordinasi pemerintahan khususnya di pemerintahan Kecamatan Watang Sidenreng sangat perlu untuk dilaksanakan karena hal tersebut merupakan usaha yang akan mengarahkan serta mempersatukan kegiatan dari satuan kerja agar tujuan pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Leonard D. White dalam Inu Kencana (2011:33) menjelaskan bahwa koordinasi merupakan penyesuaian masing-masing bagian, serta usaha menggerakkan bagian pada waktu yang tepat sehingga dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi. Koordinasi dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang harmonis. Karena hubungan kerja itu sendiri merupakan bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi yang berhasil guna oleh penyelenggara pemerintahan atau suatu organisasi.

Khususnya di Kecamatan, maka sangat penting menjaga dan memelihara hubungan yang erat dan harmonis dengan instansi-instansi yang terkait untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam segala aspek penyelenggara pemerinthan secara umum.(Zainuddin, 2017).

Uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa koordinasi adalah usaha kerja sama yang akan dilakukan oleh badan atau lembaga instansi serta unit pelaksanaan tugas tertentu sehingga saling mengisi, serta saling membantu melengkapi untuk mencapai satu tujuan. Hakikatnya koordinasi merupakan wujud daripada kerjasama serta saling membantu serta menghargai tugas serta fungsi dan tanggung jawab masing-masing (Zainuddin, 2017). Fungsi koordinasi ini sangat pentingya, apalagi kalau administrasi tetap berjalan sebagai sistem, sebagai suatu kesatuan bulat dari bagian saling berhubungan agar dapat berjalan baik dalam mencapai suatu tujaun.

Koordinasi merupakan usaha penyatuan kegiatan dengan satuan kerja organisasi sehingga hal tersebut dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna dapat melaksanakan seluruh tugas organisasi dalam pencapaian tujuan, Inu Kencana (2011:35) dalam (Zainuddin, 2017) merumuskan beberapa jenis koordinasi dalam perspektif manajemen pemerintahan, yaitu:

- a. Koordinasi Horizontal. Koordinasi horizontal merupakan penyesuaian kerja yang harmonis serta sinkron dengan lembaga yang sederajat.
- b. Koordinasi Vertikal. Koordinasi vertikal merupakan penyesuaian kerjasama yang harmonis serta sinkronisasi dari lembaga sederajat lebih tinggi kepada lembaga lain yang derajatnya lebih rendah.
- c. Koordinasi Fungsional. Koordinasi fungsional merupakan penyesuaian kerja sama secara harmonis serta sinkron antar lembaga yang memiliki persamaan dan fungsi kerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat. Koordinasi ini dilakukan oleh seorang pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya berkaitan berdasarkan asas fungsional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa koordinasi adalah proses sinergi dan keseimbangan dari semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak

dengan pihak yang lain agar supaya tercapainya tujuan bersama.

Hasibuan (2006:88), mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut

- a. Kesatuan tindakan. Pada hakikatnya koordinasi memerlukan kesadaran segenap anggota organisasi atas satuan untuk saling menyesuaikan diri dengan anggota atau satuan organisasi lainnya supaya satuan dalam tidak berjalan sendiri.
- b. Komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan dari koordinasi, sebab komunikasi merupakan unit dalam suatu lingkup organisasi dimana sebagian besar ditentukan dengan adanya komunikasi. Komunikasi merupakan hubungan antar komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.
- c. Pembagian kerja. Prinsip ini adalah maksudnya, jika suatu organisasi diharapkan untuk mendapatkan hasil dengan baik dalam mencapai tujuannya, maka hendaknya dilakukan pembagian kerja. Hal ini dapat merinci tugas serta pekerjaan agar setiap orang dalam suatu organisasi dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang terbatas.
- d. Disiplin. Suatu organisasi menurut penerapan aturan yang ada kepada seseorang serta anggota suatu organisasi yang dikelola oleh seorang pimpinan, hal tersebut diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yaitu penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya jika pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.

Tercapainya tujuan pokok organisasi dimana koordinasi merupakan suatu proses pengelompokan, pengumpulan, pengimpunan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi harus direncanakan, dikembangkan, diperlihara secara terus menerus oleh organisasi dalam

setiap kegiatan bersama atau yang mempunyai hubungan manfaat bagi orang banyak sehingga tujuan organisasi khususnya dalam menunjukkan kesejahteraan umum dapat terlaksana dengan baik.

Soewarno (2005:123), menyatakan bahwa pemerintahan adalah urusan-urusan pemerintahan dan ketertiban politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab. Apabila seseorang lebih memetingkan kedudukan daripada peranannya, maka akan terjadi hubungan-hubungan yang tidak seimbang yang seharusnya tidak terjadi.

Menurut Gibson (2003:31), menyatakan bahwa peranan adalah seperangkat perilaku yang terorganisir, peranan adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menyilihkan (validate) kedudukannya pada suatu posisi tertentu. Selanjutnya Gibson menyebutkan bahwa peranan tersebut secara budaya mendefinisikan harapan yang dihubungkan dengan kedudukan khusus. Suatu peranan dapat mencakup sikap dan nilai-nilai serta jenis perilaku tertentu. Peranan yang dimainkan oleh seseorang dalam suatu organisasi merupakan suatu pengaruh yang penting dalam suatu organisasi yang merupakan suatu pengaruh dalam perilaku maupun sikap suatu peranan tertentu yang mengandung tugas-tugas, wewenang dan harapan-harapan yang dapat mempengaruhi tindakan dan pekerjaan seseorang.

Berdasarkan uraian diatas koordinasi dalam proses administrasi manajemen pemerintahan, tetapi kenyatannya dalam praktek tidak jarang ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga pencapaian tujuan tidak selalu berjalan yang diharapkan, jadi fungsi koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan harus dilaksanakan agar dihindarkan kemungkinan timbulnya masalah yang terjadi seperti tidak efisien, tumpang tindih suatu pekerjaan dalam suatu pelaksanaan pemerintahan, dengan cara koordinasi yang baik maka setiap pekerjaan yang dilakukan setiap bawahan akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang

mengkoordinasikannya yang dapat dikatakan bahwa koordinasi itu sangat diperlukan oleh seorang pemimpin yaitu camat sebagai pemimpin suatu kecamatan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis gejala-gejala empiris dan menguraikan hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Adapun populasi dalam hal ini adalah keseluruhan jumlah pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dengan jumlah 31 orang, sedangkan teknik penarikan sampel menggunakan sampling jenuh. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuisioner, wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data yaitu menggunakan tabel frekuensi dan SPSS 16 for windows.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, kuisioner, dan study pustaka yang disebar kepada para responden maka dapat diperoleh informasi tentang fungsi koordinasi di kantor kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang. Dari penelitian tersebut, diperoleh informasi yang dapat dijadikan bahan penelitian dan kesimpulan. Fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di kantor kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan koordinasi horizontal

31 responden terdapat 1 orang yang menjawab sangat efektif dengan bobot 4 dan presentase 3,23%, terdapat 6 orang yang menjawab efektif dengan bobot 3 dan presentase 19,35%, terdapat 23 orang yang menjawab kurang efektif dengan bobot 2 dan presentase 74,19% dan 1 orang yang menjawab tidak efektif dengan bobot 1 dan presentase 3,23%. Berdasarkan data tersebut, rata-rata presentase paling banyak yang menjawab kurang efektif dengan presentase 74,19%. Kesimpulan bahwa koordinasi horizontal terhadap pelaksanaan pemerintahan di kantor kecamatan watang sidenreng belum berjalan efektif dimana dalam pelaksanaan pemerintahan masih kurangnya koordinasi horizontal yaitu kerja sama yang dilakukan oleh camat, danramil kapolsek beserta jajarannya dalam

pelaksanaan pemerintahan di kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang.

### 2. Pelaksanaan koordinasi vertical.

31 responden terdapat 2 orang yang menjawab sangat efektif dengan bobot 4 dan presentase 6,45% , terdapat 13 orang yang menjawab efektif dengan bobot 3 dan presentase 41,93%, terdapat 15 orang yang menjawab kurang efektif dengan bobot 2 dan presentase 48,38%, dan 1 orang yang menjawab tidak efektif dengan bobot 1 dengan presentase 3,2%. Berdasarkan data tersebut, rata-rata presentase paling banyak yang menjawab kurang efektif dengan presentase 48,38%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi vertikal terhadap pelaksanaan pemerintahan di kantor kecamatan watang sidenreng belum berjalan dengan baik atau masih kurang efektif dalam pelaksanaannya. Di lihat dengan masih kurangnya kerja sama antar camat dengan instansi serta aparaturnya dalam pelaksanaan pemerintahan di kecamatan watang sidenreng.

### 3. Pelaksanaan koordinasi fungsional.

31 responden terdapat 2 orang yang menjawab sangat efektif dengan bobot 4 presentase 6,45%, terdapat 17 orang yang menjawab efektif dengan bobot 3 presentase 54,84%, terdapat 11 orang yang menjawab kurang efektif dengan bobot 2 presentase 35,48%, terdapat 1 orang yang menjawab tidak efektif dengan bobot 1 presentase 3,23%. Berdasarkan data tersebut, rata-rata presentase paling banyak yang menjawab efektif dengan presentase 54,84%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi fungsional terhadap pelaksanaan pemerintahan di kantor kecamatan watang sidenreng sudah efektif hanya perlu ditingkatkan agar tetap terlaksananya pemerintahan yang lebih baik.

jenis-jenis koordinasi diatas bahwa terdapat 61,41% dari 100% yang diharapkan maka dari jumlah 61,41% memiliki kategori "efektif". Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang paling dalam jenis-jenis koordinasi yaitu 38,59% sehingga perlu untuk ditigkatakan kedepannya.

### 4. Pemerinrah dalam unsur koordinasi.

31 responden terdapat 7 orang yang menjawab sangat baik dengan bobot 4 presentase 22,58%, terdapat 9 orang yang menjawab baik dengan bobot 3 presentase 29,03%, terdapat 14 orang yang menjawab

kurang baik dengan bobot 2 presentase 45,16%, dan terdapat 1 orang yang menjawab tidak baik dengan bobot 1 presentase 3,23%. Berdasarkan data tersebut, rata-rata presentase yang paling banyak yang menjawab kurang baik dengan presentase 45,16%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan pemerintahan dalam unsur koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di kantor kecamatan watang sidenreng belum berjalan dengan baik dimana belum adanya pengaturan tentang waktu dan ketetapan waktu yang dilakukan dalam koordinasi vertikal, horizontal, maupun fungsional.

#### 5. Koordinasi dalam pelaksanaan pemerintah.

31 responden terdapa 1 orang yang menjawab sangat baik dengan bobot 4 presentase 3,23%, terdapat 12 orang yang menjawab baik dengan bobot 3 presentase 38,71%, terdapat 14 orang yang menjawab kurang baik dengan bobot 2 presentase 45,16%, terdapat 1 orang yang menjawab tidak baik dengan bobot 1 presentase 12,9%. Berdasarkan data tersebut rata-rata presentase yang paling banyak menjawab kurang baik dengan presentase 45,16%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sinkronisasi yang terjadi dalam unsur koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di kantor kecamatan watang sidenreng belum berjalan dengan baik, dimana masih kurangnya penyerataan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

#### 6. Kepentingan bersama pelaksanaan pemerintah.

31 responden terdapat 1 orang yang menjawab dengan bobot 4 presentase 3,23%, terdapat 11 orang yang menjawab baik dengan bobot 3 presentase 35,48%, terdapat 18 orang yang menjawab kurang baik dengan bobot 2 presentase 58,06%, terdapat 1 orang yang menjawab tidak baik dengan bobot 1 presentase 3,23%. Berdasarkan data tersebut rata-rata presentase yang paling banyak menjawab kurang baik dengan presentase 58,06%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dilakukan camat untuk kepentingan bersama dalam unsur koordinasi pelaksanaan pemerintahan di kantor camat watang sidenreng masih kurang baik dimana dalam pelaksanaan pemerintahannya ini dilihat dari usaha camat dalam

mengkoordinasikan pemerintahan khususnya dalam pembangunan jalan di desa-desa masih belum merata.

#### 7. Tujuan bersama dalam pelaksanaan pemerintah.

31 responden tidak terdapat yang menjawab sangat efektif, terdapat 14 orang yang menjawab efektif dengan bobot 3 presentase 45,16%, terdapat 15 orang yang menjawab kurang efektif dengan bobot 2 presentase 48,39%, terdapat 2 orang yang menjawab tidak efektif dengan bobot 1 presentase 6,45. Berdasarkan data tersebut rata-rata presentase yang paling menjawab kurang efektif dengan presentase 48,39%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dilakukan camat dalam koordinasi untuk mencapai tujuan bersama masih kurang efektif dimana masih kurangnya usaha yang dilakukan camat dalam koordinasi untuk mencapai tujuan bersama.

Rekapitulasi unsur-unsur dalam koordinasi diatas bahwa terdapat 56,75% dari 100% yang diharapkan maka dari jumlah 56,75% memiliki kategori "Baik". Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang paling dari unsur-unsur dalam koordinasi 43,25% sehingga perlu untuk ditingkatkan kedepannya, Yang paling penting dalam unsur-unsur yang ada dalam koordinasi yaitu kemampuan seorang administrator dalam hal ini camat dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan pemerintahan didalam kecamatan dengan harus memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah koordinasi agar terlaksananya pemerintahan yang lebih baik kedepannya.

#### 8. Kesatuan tindakan.

31 responden terdapat 5 orang yang menjawab sangat efektif dengan bobot 4 presentase 16,13%, terdapat 10 orang yang menjawab efektif dengan bobot 3 presentase 32,26%, terdapat 13 orang yang menjawab kurang efektif dengan bobot 2 presentase 41,93%, terdapat 3 orang yang menjawab tidak efektif dengan bobot 1 presentase 9,68%. Berdasarkan data tersebut rata-rata presentase yang paling menjawab kurang efektif dengan presentase 41,93%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kesatuan tindakan yang dilakukan camat beserta aparatur di kantor kecamatan watang sidenreng karena masih kurang efektifnya kesatuan tindakan dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam hal koordinasi.

#### 9. Komunikasi.

31 responden terdapat 4 orang yang menjawab sangat efektif dengan bobot 4 presentase 112,9%, terdapat 11 orang yang menjawab efektif dengan bobot 3 presentase 35,5%, terdapat 12 orang yang menjawab kurang efektif dengan bobot 2 presentase 38,7%, terdapat 4 orang yang menjawab tidak efektif dengan bobot 1 presentase 12,9%. Berdasarkan data tersebut rata-rata presentase yang paling menjawab kurang efektif dengan presentase 38,7%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang terjalin antar camat dengan aparatur kecamatan masih kurang efektif dan sangat perlu untuk ditingkatkan agar terjadinya suatu koordinasi yang baik oleh camat baik itu koordinasi vertikal maupun horizontal agar terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik.

#### 10. Pembagian kerja.

31 responden terdapat 1 orang yang menjawab sangat efektif dengan bobot 4 presentase 3,23%, terdapat 6 orang yang menjawab efektif dengan bobot 3 presentase 19,35%, terdapat 22 orang yang menjawab kurang efektif dengan bobot 2 presentase 70,97%, terdapat 2 orang yang menjawab tidak efektif dengan bobot 1 presentase 6,45%. Berdasarkan data tersebut rata-rata presentase yang paling menjawab kurang baik dengan presentase 70,97%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian kerja aparatur di kantor kecamatan watang sidenreng, masih belum berjalan dengan baik dilihat bahwa kadang terjadinya tumpang tindihnya pekerjaan yang kadang terjadi. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu koordinasi khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan di kantor kecamatan watang sidenreng. Pembagian kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi koordinasi karena ini sangat perlu dilakukan dalam hal mengkoordinasikan suatu sistem pemerintahan baik itu dalam pembangunan anggaran maupun sebagainya, ini dilakukan agar tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan dalam suatu pelaksanaan pemerintahan.

#### 11. Disiplin.

31 responden terdapat 7 orang yang menjawab sangat efektif dengan bobot 4 presentase 22,58%, terdapat 11 orang yang menjawab efektif dengan bobot 3 presentase 35,48%, terdapat 9 orang yang menjawab kurang efektif dengan bobot 2 presentase

29,04%, terdapat 1 orang yang menjawab tidak efektif dengan bobot 1 presentase 12,9%. Berdasarkan data tersebut rata-rata presentase yang paling menjawab baik dengan presentase 35,48%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kedisiplinan camat sebagai administrator dalam pelaksanaan pemerintahan di kantor kecamatan watang sidenreng sudah baik artinya sudah efisien dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai administrator atau kepala pemerintahan di kecamatan watang sidenreng.

Rekapitulasi faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi diatas bahwa terdapat 63,31% dari 100% yang diharapkan maka dari jumlah 36,69% memiliki kategori "Baik". Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang paling dalam faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam bentuk tenaga 36,69% sehingga sangat perlu untuk ditingkatkan kedepannya.

Pelaksanaan koordinasi horizontal yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pemerintahan di kantor kecamatan watang sidenreng belum berjalan dengan baik atau efektif. Dimana dilihat dalam olahan kuesioner yang telah direkapitulasi menunjukkan bahwa tanggapan responden mencapai 75,19% yang mengatakan kurang baik dan sangat perlu untuk ditingkatkan kedepannya. Harus diketahui bahwa untuk menciptakan koordinasi yang sinkron yang baik perlu adanya kesinambungan antar pihak yang berwenang dalam suatu instansi khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan di kecamatan watang sidenreng dalam hal ini meliputi kecamatan, yaitu kapolsek, danrami, dan camat tentunya memiliki fungsi koordinasi yang harus dijalankan dalam hal melaksanakan struktur pemerintahan yang ada di kecamatan watang sidenreng. Agar terciptanya pemerintahan yang lebih baik kedepannya.

Koordinasi vertikal yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pemerintahan di kantor kecamatan watang sidenreng masih kurang efektif dilihat masih kurangnya kerja sama yang baik antar camat dengan aparatur yang ada dibawahnya sehingga masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi didalamnya. Dalam hal koordinasi khususnya dalam koordinasi vertikal ini sangat penting dilaksanakan agar tidak terjadinya suatu konflik dalam suatu pelaksanaan pemerintahan dan juga tidak terjadinya



perbedaan pendapat antar pihak satu dengan yang lainnya. Koordinasi vertikal ini bertujuan untuk menjaga keefektifitasan organisasi seoptimal mungkin dengan sinkronisasi, kebersamaan, keselerasan, serta keseimbangan antara aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan di kecamatan watang sidenreng.

Koordinasi fungsional dalam repikulasi data yang dilakukan dalam olahan kuesioner menunjukkan bahwa koordinasi fungsional dalam pelaksanaan pemerintahan di kecamatan watang sidenreng sudah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan kedepannya.

Tujuan dari koordinasi fungsional ini agar tercapainya KISS (Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi) supaya pencapaian dan tujuan organisasi diraih seefektif dan seefisien mungkin dari unit teratas sampai unit terbawah seperti dari kabupaten/kota, hingga kecamatan samapai di desa-desa. Untuk itu perlunya kerja sama yang baik antar semua pihak khususnya dalam muspika kecamatan dalam bentuk vertikal, horizontal maupun fungsional.

Pengaturan dalam hal ini usaha administrator kecamatan (camat) masih kurang baik. Pasalnya masih kurangnya pengaturan waktu dan ketetapan waktu koordinasi. Tidak adanya hal yang mengatur tentang pengkoordinasian di kantor kecamatan ini. Pengaturan dan waktu dan ketetapan waktu koordinasi ini harus ada dibuat sesuai dengan kebutuhan koordinasi. Pengaturan waktu dan ketetapan waktu koordinasi ini sangat penting untuk pencapaian keberhasilan instansi atau organisasi. Koordinasi akan tercapai jika semua instansi yang berkoordinasi ini dapat memenuhi pengaturan dan ketetapan waktu berkoordinasi.

Sinkronisasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pemerintahan di kecamatan watang sidenreng masih kurang baik. Seperti rapat koordinasi yang jarang dilakukan yakni musyawarah maupun yang berupa formal yang kurang berjalan serentak dan tidak beraturan. Unsur koordinasi ini bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan suatu koordinasi vertikal horizontal maupun fungsional dalam pengerjaannya.

Unsur ini menunjukkan bahwa koordinasi merupakan pandangan menyeluruh dalam mencapai sasaran bersama, di mana Camat masih kurang dalam hal melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Kepentingan bersama ini merupakan cara pandang dalam mencapai sasaran bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, koordinasi juga akan berjalan dengan baik jika ada unsur kepentingan bersama yang ditetapkan dalam menjalani koordinasi.

Tujuan bersama, yaitu koordinasi berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana tujuan tersebut untuk menciptakan dan memelihara efektifitas pembangunan, melalui sinkronisasi, penyerasian, dan kesinambungan antara instansi-instansi, mencegah konflik, dan juga menciptakan efisiensi yang tinggi melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam kepentingan bersama.

Salah satu faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu kesatuan tindakan, di mana koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau instansi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Kesatuan tindakan ini adalah suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya koordinasi yang baik secara vertikal, horizontal maupun fungsional dan berjalan dengan semestinya.

Komunikasi dan Koordinasi sebagai aspek penting manajemen, memerlukan sebuah sumber daya manusia, yang didalamnya terdapat pola pikir untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, diperlukannya hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, guna untuk mengetahui lebih jelas dan lebih dalam apa yang dimaksud dengan komunikasi dan koordinasi sebagai suatu aspek penting dalam manajerial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam hal ini, kami mengaitkan permasalahan dalam rapat perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara unsur

pimpinan dengan bawahan dalam suatu organisasi. Komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi dalam hal ini pelaksanaan pemerintahan sangat perlu untuk ditingkatkan mengingat komunikasi ini merupakan hubungan antar komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peran dalam menciptakan suatu komunikasi yang baik dalam berkoordinasi.

Pembagian kerja ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi koordinasi dimana pembagian kerja ini sangat penting dilaksanakan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam suatu pekerjaan, dimana pembagian kerja ini dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam usaha mencapai tujuan. Pembagian kerja ini diharapkan untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi dalam berkoordinasi dengan baik.

Suatu organisasi atau instansi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan, pemeimpin diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan. Perilaku disiplin dalam sebuah koordinasi sangat perlu dilakukan agar dalam proses pencapaian tujuan dapat berjalan dengan baik dan efektif, jadi perilaku disiplin harus di tanamkan bukan hanya kepada pemepin saja tentunya juga perlu ditanamkan kepada bawahan agar terciptanya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan harapan.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling tinggi persentasenya adalah faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu 63,31% , dan indikator yang paling rendah yaitu unsur-unsur koordinasi yaitu 56,85%. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (A.S Pratiwi,2016) dengan judul skripsi fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan maritenggae kabupaten sidenreng rapping, bahwa koordinasi merupakan suatu satu kerja yang dilaksanakan untuk mencapai satu tujuan bersama. Yang mana dalam pelaksanaan suatu pemerintahan sangat di butuhkan sebuah koordinasi baik itu koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan maritenggae. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan kualitatif yang berpaku pada teori Stoner(2005:89) sebagai fokus penelitian dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi. Hasil penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi wawancara dan study pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan maritenggae masih belum berjalan dengan efektif.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi Koordinasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di kantor kecamatan watang sidenreng kurang baik dengan nilai rata-rata 61,41%
2. Indikator dalam unsur-unsur koordinasi yang memiliki presentase tertinggi yaitu pengaturan dengan 67,5% sedangkan presentase yang paling rendah adalah kepentingan bersama 50%.
3. Indikator faktor yang mempengaruhi koordinasi yang memiliki presentase tertinggi yaitu kesatuan tindakan dengan nilai 69,25% sedangkan presentase yang paling rendah adalah pembagian kerja 53%.

#### E. REFERENSI

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian ADMINISTRASI PUBLIK Teori Dan Aplikasi*. PENERBIT GAVA MEDIA.
- Anggota IKAPI. (2014). *Desa Kelurahan dan Kecamatan*. FOKUSMEDIA.
- Bruno, L. (2019). peran lembaga sosial.
- Deddy Mulyadi. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. AL
- FARISI, G. M. (2018). *implemenrasi tugas dan wewenang camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan dan kecamatan menurut undang-undang no 23 tahun 2014*.
- Inu Kencana, S. (2017). *PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN*. Refika Aditama.
- Muhammad Nur. (2017). *ORGANISASI dan Manajemen*. deepublish.
- Munawar, H. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh

dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam.

- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Nur Rafida Herawati., R. K. (2012). *Konsep Dasar Organisasi Definisi, Tujuan Dan Proses*.
- Oliver, J. (2013). kedudukan dan kewenangan pemerintah kecamatan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Richard M. Steers. (2018). *EFEKTIVITAS ORGANISASI*. PPM Manajemen.
- Sarumaha, W. Y., & Dewi, R. (2016). *Peran Camat Dalam Mengawasi Kinerja Pegawai di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan*
- Shalfiah, R. (2013). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung program-program Pemerintah Kota Bontang.
- Syaria'ah, F. (2005). Universitas Islam Negeri Malang.
- Veithzal Rivai. (2003). *kepemimpinan dan perilaku organisasi*. PT RajaGrafindo Preseda.
- Wahyudi. (2011). *TEORI KOORDINASI A . Penelitian Terdahulu yang Relevan Skripsi ini menulis atau mengkaji tentang Sistem Koordinasi . 12–38*.
- Wahyuni, S. (1945). *peranan koordinasi terhadap prduktivitas kerja pegawai pada kantor dinas pekerjaan umum provensi kalimantan timur*.
- Winordi, J. (n.d.). *Prof. Dr. J. Winordi, S.E.*
- Zainuddin. (2017). *teori-teori mutakhir dalam prespektif ilmu administrasi publik*. PHINATAMA MEDIA.